

KPK Cueki Laporan LSM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum bergerak mengusut adanya dugaan korupsi dalam pengadaan konsultan desain pembangunan gedung baru DPR, yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 14,5 miliar. KPK beralasan masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengadaan itu.

"Kalau ada penyimpangan, BPK akan melakukan pemeriksaan dulu, baru hasilnya disampaikan ke penegak hukum salah satunya KPK," ujar wakil pimpinan KPK M Jasin, Senin (28/3).

Meski begitu, KPK, kata Jasin, tak selalu bergantung pada laporan BPK untuk bisa memulai penyelidikan terhadap adanya dugaan pidana korupsi. KPK, juga akan menindaklanjuti setiap laporan adanya pidana korupsi yang

berasal dari masyarakat.

"Bila diduga ada indikasi pidananya. Tidak hanya BPK saja, tapi laporan masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan di situ, maka akan ditindak lanjuti," katanya.

Namun, lanjut Jasin, laporan itu harus berbentuk dokumen, bukan sekadar keterangan lisan seperti yang disampaikan sejumlah LSM, terkait indikasi dugaan korupsi di pengadaan konsultan desain pembangunan gedung baru DPR.

"Kalau lisan enggak bisa ditindak lanjuti. Laporan yang bisa diproses untuk dianalisis itu harus tertulis dilampiri bukti awal sebagai jendela masuk. Kalau hanya sinyalemen ya repot. Makanya idealnya diperiksa dulu oleh BPK, ada atau tidak indikasi penyimpangan yang mengarah pidana korupsi," tuturnya. (Tribunnews/Roy)